



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, KAMIS 10 AGUSTUS 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI

ADVERTORIAL

Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB di Sidoarjo Legislatif: Selain Menurunkan Angka Stunting Juga Mampu Mekan Kemiskinan Ekstrem

Rabu, 9 Agustus 2023, 10:34 WIB
Reporter : M Ismail



Pariwara Seputar Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo

H Usman M. Kes Ketua **Bambang Riyoko, SE Wakil Ketua** **Kayan, SH Wakil Ketua** **Dr H Emir Firdaus, ST, M Wakil Ketua**

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan gedung balai penyuluhan KB di Sidoarjo mendapat respon positif dari anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Balai penyuluhan KB yang baru pertama kali dibangun di Sidoarjo tersebut diharapkan dapat menurunkan angka stunting, dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nashih mengapresiasi atas realisasi pembangunan gedung balai penyuluhan KB di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberadaan balai penyuluhan KB yang baru pertama kalinya dibangun di Sidoarjo dinilai banyak manfaat.

"Harapannya keberadaan balai penyuluhan KB, calon pengganti atau ibu-ibu muda yang sedang hamil bisa lebih dekat saat berkonsultasi kesehatan ibu dan anaknya," ucap Abdillah Nashih, Rabu (9/8/2023).

Abdillah Nashih mengakui keberadaan balai penyuluhan KB sangat penting, dan merupakan terobosan baru dalam menurunkan angka stunting dan mengentas kemiskinan di Sidoarjo. Meski demikian, pihaknya menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan sarana prasarananya, melainkan alat kelengkapan dan SDM.

"Persoalan stunting menjadi PR kita bersama. Termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Di dinas tersebut banyak kader, harapannya dengan keberadaan gedung ini bisa dijadikan ruang rembuk, diskusi, dan konsultasi. Sehingga persoalan stunting bisa tertangani dengan baik," tegasnya.

Angka prevalensi stunting di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita mengalami penurunan sebesar 3,27%, yaitu dari 27,67% pada tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021.

Meski terjadi penurunan, namun stunting masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena target angka prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu sebesar 14% di tahun 2024.

Sementara, berdasarkan data Sistem Surveilans Gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting di Sidoarjo sebesar 16,1 persen. "Kami menargetkan angka stunting di Sidoarjo bisa turun lagi menjadi 7,36 persen," harap politisi asal PKB itu.

Restoran Pelanggar Pajak Ditemplei Stiker Peringatan

Terindikasi Memodifikasi Alat Perekam Transaksi

SIDOARJO – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo menempelkan stiker peringatan ke salah satu restoran di Jalan Taman Pinang Indah kemarin (9/8). Restoran tersebut terindikasi memanipulasi pajak. Sejak awal tahun ini, sudah ada tujuh restoran yang ditemplei stiker bertuliskan "objek pajak ini dalam pengawasan BPPD Sidoarjo" tersebut. Penyidik BPPD Sidoarjo Surendro Nurbawono mengatakan, pihaknya menempelkan stiker karena wajib pajak tersebut sudah diberi peringatan, tetapi tidak mengubis. "Objek pajak ini terindikasi melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2010 dan Perda Nomor 6 Tahun 2021," katanya. Restoran tersebut diduga tidak melaporkan omzet sebagaimana mestinya. "Ada indikasi yang dilaporkan hanya seperiga dari omzet," ujarnya. Artinya, pajak daerah yang seharusnya dibayarkan masih kurang.



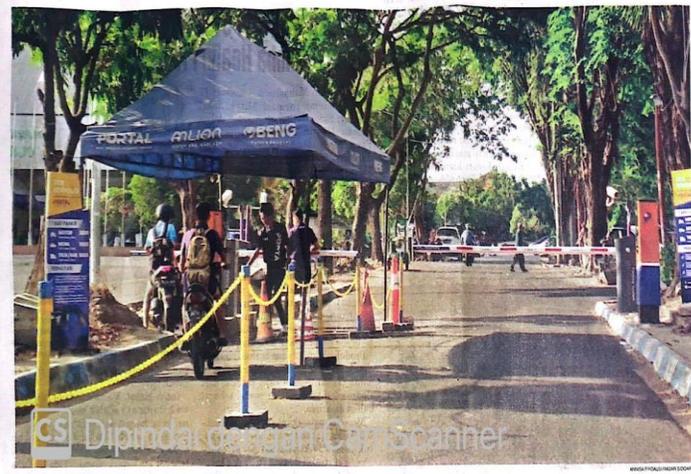
BELUM BAYAR PAJAK: Surendro Nurbawono memasang stiker di tempat usaha yang terindikasi menunggak pajak di Taman Pinang Indah (TPI) kemarin.

Rendro mengatakan, pihaknya juga sudah memasang alat perekam transaksi untuk memonitor transaksi di restoran tersebut. Hasilnya, ada kejanggalan. "Ada indikasi banyak transaksi yang tidak terekam. Mereka terindikasi mengutak-atik dan memodifikasi data transaksi," paparnya.

Pihaknya sempat memanggil pengelola, tapi mereka tidak datang. Selain menempelkan stiker, pihaknya kembali melakukan pemanggilan kemarin. Dengan begitu, kekurangan pembayaran bisa segera dilunasi. Rendro menyebut sejak awal tahun ini sudah ada tujuh restoran yang ditemplei stiker.

Kasusnya mirip. "Ada empat resto dan kafe yang terindikasi melanggar juga. Kami akan tindak lanjut juga," ujarnya. Dia mengatakan, pihaknya berupaya menekan adanya wajib pajak yang curang. Karena itu, alat perekam transaksi juga terus dipasang di sejumlah restoran. "Saat ini sudah terpasang di 355 restoran. Dalam minggu ini kami kembali tambah pemasangan," katanya.

Indri Hari, pengelola restoran di Taman Pinang, berdalil belum pernah memungut pajak 10 persen ke pelanggannya. "Baru seminggu kami masukkan 10 persen pajaknya ke *billing*" ujarnya. Dia menyebutkan, pihaknya segera menyelesaikan masalah tersebut dan memenuhi panggilan BPPD Sidoarjo. (uzi/c7/any)



BELUM TUNTAS: Salah satu titik parkir di Sidoarjo yang menjadi potensi pendapatan daerah.

Target PAD Turun di Perubahan APBD, Sektor Pajak Malah Naik

KOTA-Pos pendapatan daerah dalam Kerangka Umum Anggaran dan Prioritas Papan Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Sidoarjo mengalami peningkatan. Meskipun demikian, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Dari Rp 1.935 triliun menjadi Rp 1.905 triliun. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Dedy Haryanto menjelaskan bahwa penurunan PAD disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari pos retribusi. Termasuk retribusi parkir. Menurut Dedy, permasalahan hukum pada pengelolaan parkir yang masih berlangsung menjadi alasan utama penurunan retribusi. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa pos pajak daerah mengalami kenaikan yang signifikan. (Ka Halaman 10)

TPA Jabon Akan Segera Tagih Biaya Layanan Sampah Kepada TPS

SIDOARJO – Anggaran bahwa biaya layanan sampah di Sidoarjo digratiskan mulai Februari 2023 hingga sekarang itu tidak benar. Hal tersebut ditambah oleh Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat, bahwasanya biaya layanan sampah akan segera ditagih ke TPS 3R maupun TPST. Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig mengatakan bahwa penagihan biaya layanan sampah akan segera dilaksanakan. Hal tersebut menunggu Revisi Perbup No 116 tahun 2022 tentang pedoman penghitungan pengelolaan persampahan di Sidoarjo yang segera tuntas. Saat ini, sudah proses pembahasan akhir. "Rencananya, akan ada penurunan tarif. Namun berapa nominalnya nanti ketika sudah fix akan kami sampaikan," ujarnya singkat, Rabu (9/8/23). Masih lanjut Amig, revisi perbup tersebut sesuai dengan hasil diskusi bersama antara perwakilan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Kebersihan (DLHK) dan juga Bupati Sidoarjo pada 16 Mei silam.



Aktivitas TPA Jabon Sidoarjo-Rabu (9/8/23).

"Tarif baru sudah kita kaji bersama, dan sekarang sudah tahap akhir," jelasnya. Selama proses revisi ini, layanan persampahan tetap berjalan. Termasuk, hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat menambahkan, pihaknya sampai saat ini juga tetap mencatat seluruh sampah yang masuk ke TPA dari TPST. Namun, pembayarannya dilakukan nanti setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi Perbup. Jika tidak direvisi, maka tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per-ton sebesar Rp. 150.000. Namun, tarif tersebut nantinya direvisi. "Kami tetap melakukan rekapitulasi terhadap layanan angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari argo lalu," kata Hajid. Selain itu, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya ke TPST. Karena perbup masih dibahas. "Bukan berarti kirim sampah ke TPS gratis. Tetap bertarif tapi penagihannya nanti ditotal setelah revisi," ucapnya. Dirinya menampik anggapan

bahwa mengirim sampah ke TPA tidak dikenakan biaya sama sekali selama proses revisi Perbup ini. Sehingga, TPST tidak asal membuang sampah. Mereka akan mengolah dulu. Sebab semakin sedikit sampah yang dibuang ke TPA, semakin sedikit pula biaya yang harus mereka keluarkan. "Kalau mau biaya ringan, harusnya sampah diolah di TPS semaksimal mungkin, supaya tidak ada residu yang dibuang ke Jabon," pungkasnya. (Loe)

Tarif Layanan TPA ke TPS Tetap Berjalan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA Pemkab Sidoarjo saat ini sedang menggodok revisi Peraturan Bupati No. 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan di Sidoarjo segera tuntas. Dalam revisi tersebut, pemerintah bakal menurunkan tarif persampahan. Revisi perbup tentang pengelolaan sampah dilakukan setelah adanya diskusi bersama antara bupati Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan perwakilan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pada 16 Mei 2023. "Ada perubahan tarif. Namun berapa nominalnya nanti ketika sudah fix akan kami sampaikan," jelas Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig. Menurutnya, revisi perbup tersebut dalam waktu dekat akan segera selesai. Meski demikian, selama proses revisi ini, layanan persampahan tetap berjalan. Termasuk, hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dari TPS. Namun, pembayarannya dilakukan setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi Perbup. "Selama ini tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per-ton sebesar Rp. 150.000. Nah, tarif tersebut yang akan direvisi. Kami tetap melakukan

rekapitulasi terhadap layanan angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari, argo tetap jalan," kata Hajid. Selama ini, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya ke TPST. Karena perbup masih dibahas. "Bukan berarti kirim sampah ke TPA gratis. Tetap bertarif tapi penagihannya nanti ditotal setelah revisi," jelasnya. Dia menampik bahwa penghitungan biaya ke TPA tidak dikenakan biaya sama sekali selama proses revisi Perbup. Sehingga, TPST tidak asal membuang sampah. "Mereka akan mengolah dulu. Sebab semakin sedikit sampah yang dibuang ke TPA, semakin sedikit pula biaya yang harus mereka keluarkan," tandasnya. (cat/rd)



Salah satu tempat Pembuangan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ADVERTORIAL

Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB di Sidoarjo Legislatif: Selain Menurunkan Angka Stunting Juga Mampu Menekan Kemiskinan Ekstrem

Rabu, 9 Agustus 2023, 10:34 WIB
Reporter : M Ismail



H Usman M.Kes
Ketua

Bambang Riyoko, SE
Wakil Ketua

Kayan, SH
Wakil Ketua

Dr H Emir Firdaus, ST, MM
Wakil Ketua

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan gedung balai penyuluhan KB di Sidoarjo mendapat respon positif dari anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Balai penyuluhan KB yang baru pertama kali dibangun di Sidoarjo tersebut diharapkan dapat menurunkan angka stunting, dan menekan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengapresiasi atas realisasi pembangunan gedung balai penyuluhan KB di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberadaan balai penyuluhan KB yang baru pertama kalinya dibangun di Sidoarjo dinilai banyak manfaat.

"Harapannya keberadaan balai penyuluhan KB, calon pengantin atau ibu-ibu muda yang sedang hamil bisa lebih dekat saat berkonsultasi kesehatan ibu dan anaknya," ucap Abdillah Nasih, Rabu (9/8/2023).

Abdillah Nasih mengakui keberadaan balai penyuluhan KB sangat penting, dan merupakan terobosan baru dalam menurunkan angka stunting dan mengentaskan kemiskinan di Sidoarjo. Meski demikian, pihaknya menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan sarana prasarannya, melainkan alat kelengkapan dan SDM.

"Persoalan stunting menjadi PR kita bersama. Termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Di dinas tersebut banyak kader, harapannya dengan keberadaan gedung ini bisa dijadikan ruang rembuk, diskusi, dan konsultasi. Sehingga persoalan stunting bisa tertangani dengan baik," tegasnya.

Angka prevalensi stunting di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita mengalami penurunan sebesar 3.27%, yaitu dari 27.67% pada tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021.

Meski terjadi penurunan, namun stunting masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena target angka prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu sebesar 14% di tahun 2024.

Sementara, berdasarkan data Sistem Surveilans Gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting di Sidoarjo sebesar 16,1 persen. "Kami menargetkan angka stunting di Sidoarjo bisa turun lagi menjadi 7,36 persen," harap politisi asal PKB itu.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

beritajatim.com



Ketua Komisi D DPRD Kab. Sidoarjo, Abdillah Nasih

Dukungan juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso. Menurutnya, keberadaan balai penyuluhan KB dapat menunjang penurunan stunting dan angka kemiskinan.

Diakui, keberadaan DP3AKB fokus pada perubahan pola pikir masyarakat. Ada lima faktor penyebab meningkatnya angka stunting. Yakni, kemiskinan ekstrem, pola asuh, sanitasi yang buruk, pemahaman atau edukasi kesehatan reproduksi dan intervensi gizi spesifik.

"Nah, kalau ada balai penyuluhan kan lebih fokus penanganannya. Misal edukasi terhadap calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dengan ditunjang data-data masing-masing kecamatan berapa yang akan menikah tahun ini. Kemudian intervensinya diberi pil penambah darah misalnya, Ketika reproduksi sehat, maka janin yang dikandung juga terhindar dari potensi stunting. Selama ini kan belum ada tempat untuk berkegiatan seperti itu," jelas Bangun Winarso.

Disamping itu, lanjut Bangun, bagaimana keluarga berencana (KB) tersebut menjadi keluarga yang benar-benar harmonis, dan ekonominya stabil. Sebab, KB tidak hanya mengurus memiliki dua anak cukup, tapi bagaimana kesehatan keluarga, pendidikan keluarga maupun kesejahteraan keluarga dan lain-lain.

"Ini kalau penyuluhan, monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara dekat dengan masyarakat, maka akan kesulitan. Nah penyuluhan KB ini sangat penting sebagai sarana penurunan stunting, dan program keluarga berencana dapat berhasil.

Angka Kemiskinan Ekstrem

Menurut Bangun, sejak merebaknya Virus Covid-19 terjadi peningkatan angka kemiskinan di Sidoarjo dari 5,3 persen kepala keluarga miskin menjadi 5,9 persen. Meski demikian, hal itu tidak sebanding dengan angka pengangguran. Sementara diwaktu yang sama, pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan.

"Harusnya kan angka kemiskinan bisa turun sejalan dengan angka perekonomian tumbuh. Jadi tidak hanya bertengger di angka 5,9 persen. Karena target kita angka kemiskinan sebanding dengan pertumbuhan di Sidoarjo," urainya.

Disisi yang lain, buruknya sanitasi juga menjadi faktor peningkatan stunting. Sebab, lingkungan yang sehat dapat mengurangi atau membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting.

"Jambannya enggak sehat, ada yang enggak punya jamban, atau ada yg punya jamban tapi dialirkan ke sungai. Terutama yang dipinggir-pinggir sungai," jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, ada sekitar 5 ribuan keluarga di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memiliki jamban. Baik di Kecamatan Jabon, Buduran, Krembung dan beberapa kecamatan lain.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Anggota DPRD Kab Sidoarjo dari Fraksi PAN Bangun Winarso

"Tapi variatif dan hampir semua kecamatan belum bebas buang air sembarangan. Karena pola pikirnya belum tersentuh atau berubah bahwa buruknya sanitasi justru menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk pertumbuhan yang lambat seperti stunting," tegasnya.

Dia berharap pembangunan gedung balai penyuluhan KB tidak hanya sekedar membangun sarana prasarana. Melainkan dilengkapi dengan sarana penunjang, seperti SDM maupun alat-alat, meja, kursi, komputer, internet dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal memiliki Balai Penyuluhan Keluarga Berencana. Balai penyuluhan yang dibangun di dua kecamatan tersebut yakni Sukodono dan Tarik sebagai bentuk upaya penurunan angka stunting.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Mursalim menjelaskan bahwa dua proyek pembangunan balai penyuluhan ini sudah dimulai sejak bulan lalu.

Untuk Balai Penyuluhan di Sukodono dimulai tanggal 7 Juni 2023, sedangkan di Tarik mulai 12 Juni 2023. Hingga saat ini pembangunannya sudah mencapai 60 persen.

"Kami sudah mulai pembangunan Balai Penyuluhan KB di Sukodono dan Tarik, yang nantinya akan digunakan untuk mempermudah koordinasi percepatan penurunan angka stunting di Sidoarjo," terang Salim.

Hingga kemarin progres pembangunan balai penyuluhan di Sukodono sudah 60 persen, yang meliputi lantai dalam, plafon dan kusen. Sementara untuk yang di Kecamatan Tarik sudah 11 persen, dengan penyelesaian pondasi pemasangan baru. Untuk pembangunan Balai penyuluhan ini, Pemkab Sidoarjo menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

Untuk pembangunan gedung di Sukodono seluas 168,7 meter persegi dialokasikan dana sebesar Rp 259.407.690. Sedangkan di Kecamatan Tarik dengan luas bangunan mencapai 224,04 meter persegi alokasi anggarannya mencapai Rp 583.199.200. (adv/isa)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pembagian Bantuan Sound Bagi RT se-Krian Dihadiri Tiga Anggota DPRD Sidoarjo

Sidoarjo, Pojok Kiri

Tiga anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yakni Kayan (Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra), Sudjalil (Fraksi PDIP) dan Bangun Winarso (Fraksi PAN) hadir pada kegiatan penyerahan bantuan sound untuk RT se kecamatan Krian (8/8/2023).

Kehadiran mereka bertiga untuk mengawal dan melihat dari dekat proses serta respon masyarakat khususnya para ketua RT terkait bantuan sound dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.

“Pemberian bantuan sound ini adalah hal positif dalam kaitannya untuk meningkatkan semangat kerja sosial rekan rekan RT dalam membantu mensosialisasikan program pembangunan Pemkab kepada masyarakat di lingkungannya. Hal ini juga merupakan salah satu dari 17 program prioritas Pak Bupati,” kata Kayan yang juga ketua Partai Gerindra di Sidoarjo.

Hal senada turut disampaikan oleh Sudjalil dari Fraksi PDIP. “Kami sengaja ikut datang disini guna melihat langsung pelaksanaan pemberian bantuan sound ini yang juga ikut kami proses hingga terealisasi sekarang,” ucap Sudjalil.

Sementara Bangun Winarso dari Fraksi PAN lebih fokus kepada program BPJS. Dirinya bersemangat mengajak masyarakat yang hadir malam itu untuk memanfaatkan program kesehatan pemerintah tersebut.

Namun secara umum, ketiga wakil rakyat itu kompak melontarkan kesiapan untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat demi kemanfaatan. (sigit)

CS Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Produk Ekonomi Kreatif Sidoarjo Tembus Pasar Luar Negeri

August 9, 2023



Anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Sulamul Hadi Nurmawan. (Foto: Istimewa)

SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo mendorong para pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) di kabupaten Sidoarjo untuk bisa lebih maju mengembangkan usahanya. Pasalnya, berbagai produk yang dihasilkan oleh pelaku Ekraf Sidoarjo mampu menembus pasar dalam dan luar negeri.

Seperti produk tas kulit, tas kulit ukir, batik tulis, sepatu kulit, dan batik lukis. Usaha di bidang fashion, seperti bordir dan aksesoris berbahan batu permata, juga berkembang. Bahkan dalam usaha kuliner dengan produk olahan dari udang dan bandeng dan lainnya perkembangannya sangat pesat.

Anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Sulamul Hadi Nurmawan menyampaikan, peluang ekonomi kreatif di Sidoarjo sangat besar, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat mendukung seperti saat ini, para pelaku Ekraf bisa lebih leluasa memasarkan produknya melalui berbagai aplikasi yang tersedia di dunia maya.

Baca Juga : [Siswi SMA Al Muslim Raih The Best Project Group di Istanbul Youth Summit](#)

"Saat ini yang perlu dilakukan oleh para pelaku Ekraf agar lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan produknya," kata Gus Wawan, sapaan akrabnya, Rabu (09/08/2023)

Kata Gus Wawan, hampir seluruh masyarakat yang menggunakan HP android dalam berbagai aktifitas, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku Ekraf dalam mengenalkan berbagai produknya dan setiap saat bisa dilihat oleh masyarakat hanya dengan sentuhan jari di layar android.

"Pelaku Ekraf harus berusaha menjadikan viral produknya di media sosial, melalui berbagai konten yang dibuat lebih kreatif," terangnya.

Menurutnya, legislatif dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sangat mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Berbagai kebijakan-kebijakan diambil untuk membantu perkembangan Ekraf.

"Banyak hal yang bisa dilirik dalam mengembangkan usaha Ekraf diantaranya, konten kreator, advertisement, kuliner, fashion dan lainnya," paparnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Angkat Guru Dan Tenaga Teknis Menjadi ASN PPPK

 Biro Sidoarjo
9 August 2023



ANALISAPUBLIK.COM | Sidoarjo -Wajah sumringah ditunjukkan ribuan guru di Sidoarjo. SK PPPK yang ditunggunya telah sampai ditangannya. Tahun 2022 lalu, mereka dinyatakan lulus tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ada sebanyak 1220 guru formasi 2022 yang beruntung. Saat itu, Pemkab Sidoarjo juga membuka formasi PPPK untuk tenaga teknis. Hasilnya 66 orang lulus tes PPPK. Rabu, (9/8), SK PPPK tersebut dibagikan di Convention Hall Suncity Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP sendiri yang membagikannya langsung.

Ada beberapa pesan yang disampaikan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor dalam sambutannya. Pertama, guru dapat mencetak generasi yang memiliki keahlian. Bukan hanya mencetak generasi berpendidikan. Menurutnya sudah terlalu banyak orang yang berpendidikan tinggi. Bukan hanya di Sidoarjo saja. Namun di





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Indonesia. Itu berbanding terbalik dengan jumlah orang yang memiliki keahlian. Jumlahnya sedikit. Menurutnya faktor itu salah satu penyebab banyak sarjana nganggur.

“Ada ratusan ribu sarjana nganggur, bingung mencari pekerjaan, maka dari itu saya sampaikan jangan hanya cetak anak pintar, tapi juga cetak anak yang memiliki keahlian,” pesannya yang disambut tepuk tangan ribuan guru yang hadir.

Pesan selanjutnya ucap bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor adalah loyalitas. Dikatakannya sebagai ASN, harus loyal kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sepenuh hati mencintai Kabupaten Sidoarjo. Wujudnya ikut memajukan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Meski bukan ASN asli warga Sidoarjo. Apalagi yang asli warga Sidoarjo. Harus sekuat tenaga dan pikiran dicurahkan bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

“Loyalnya bukan kepada bupati, bukan kepada ketua DPRD tetapi kepada Kabupaten Sidoarjo, jangan pernah kecewakan Kabupaten Sidoarjo yang sudah memberikan kemenangan bagi kita semua,” ucapnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Angkat Guru dan Tenaga Teknis Menjadi ASN PPPK

Admin 2 Min Read
August 9, 2023



| Sidoarjo, [Metroliputan7.com](https://metroliputan7.com). –

Wajah sumringah ditunjukkan ribuan guru di Sidoarjo. SK PPPK yang ditunggunya telah sampai ditangannya. Tahun 2022 lalu, mereka dinyatakan lulus tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ada sebanyak 1220 guru formasi 2022 yang beruntung. Saat itu, Pemkab Sidoarjo juga membuka formasi PPPK untuk tenaga teknis. Hasilnya 66 orang lulus tes PPPK. Pagi tadi, Rabu, (9/8), SK PPPK tersebut dibagikan di Convention Hall Suncity Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP sendiri yang membagikannya langsung.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ada beberapa pesan yang disampaikan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor dalam sambutannya. Pertama, guru dapat mencetak generasi yang memiliki keahlian. Bukan hanya mencetak generasi berpendidikan. Menurutnya sudah terlalu banyak orang yang berpendidikan tinggi. Bukan hanya di Sidoarjo saja. Namun di Indonesia. Itu berbanding terbalik dengan jumlah orang yang memiliki keahlian. Jumlahnya sedikit. Menurutnya faktor itu salah satu penyebab banyak sarjana nganggur.

“Ada ratusan ribu sarjana nganggur, bingung mencari pekerjaan, maka dari itu saya sampaikan jangan hanya cetak anak pintar, tapi juga cetak anak yang memiliki keahlian,” pesannya yang disambut tepuk tangan ribuan guru yang hadir.

Pesan selanjutnya ucap bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor adalah loyalitas. Dikatakannya sebagai ASN, harus loyal kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sepenuh hati mencintai Kabupaten Sidoarjo. Wujudnya ikut memajukan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Meski bukan ASN asli warga Sidoarjo. Apalagi yang asli warga Sidoarjo. Harus sekuat tenaga dan pikiran dicurahkan bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Gus Bupati Realisasikan Bantuan Sound Ke-22 Desa dan 500-an RT se-Krian

Sidoarjo, Pojok Kiri

Ratusan masyarakat dari sebelas desa se kecamatan Krian datang memenuhi ruangan pendopo dan halaman kantor Pemdes Sedengan mijen (8/8/2023) malam. Kehadiran mereka yang terdiri dari para RT itu untuk mengambil jatah bantuan sound dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.

Pada sambutannya, Bupati menyampaikan “penyerahan sound ini salah satu dari belasan program prioritas Pemkab. Mengingat RT maupun RW adalah struktur organisasi pemerintahan yang ada digaris terdepan dalam meneruskan program kabupaten kepada lingkungan dan masyarakatnya. Tanpa dukungan RT dan RW serta desa ataupun kelurahan, Pemkab tidak akan bisa bekerja dengan baik,” kata orang nomor satu di Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Bupati itu.

Muhdlor juga menambahkan di 2024 nanti akan direalisasikan penambahan insentif bagi para ketua RT dan RW se Sidoarjo. “Besarnya nominalnya Rp 500 ribu per bulan. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu program prioritas saya dengan harapan insentif itu makin menambah semangat RT/RW dalam bertugas,” tambahnya.

Sementara itu, M Hasanuddin Kades Sedenganmijen merespon positif program Bupati. “Saya mewakili masyarakat dan rekan Kades se Krian mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati dan para wakil rakyat anggota DPRD Sidoarjo atas upayanya sehingga bantuan ini terealisasi sekarang,” ujar Hasanuddin.

Selain Bupati dan pejabat eselon kabupaten, turut pula hadir tiga anggota DPRD Sidoarjo yakni Kayan F Gerindra, Sudjalil F PDI-P dan Bangun Winarso F PAN.

Desa Sedenganmijen sendiri pada hari itu menerima bantuan sound sebanyak 27 dari 27 RT yang ada. Total keseluruhan jumlah sound yang diberikan sebanyak 500 lebih kepada 500 an RT yang ada di 22 desa se Krian. (git)

Dipindai dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



HUT istri wakil bupati Sidoarjo dirayakan dengan menyantuni anak yatim.

Istri Wabup Sidoarjo Rayakan Ultah dengan Menyantuni Yatim Piatu

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Istri wakil bupati Sidoarjo juga Kepala Desa Pabean Sriatun, genap berusia 44 tahun pada tanggal 8 Agustus 2023. Dia merayakan hari ulang tahun secara sederhana bersama anak yatim piatu.

Pengajian serta pemotongan tumpeng diadakan di rumah kediaman di Desa Pabean pada Selasa (8/8). Acara ini dihadiri kerabat, keluarga, dan yatim piatu.

“Saya bersyukur dan syukur alhamdulillah atas anugerah yang diberikan oleh Nya sehingga saya masih diberikan keselamatan dan kesehatan. Mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengemban amanah rakyat Pabean dan Sidoarjo dengan baik,” ujarnya.

Dia mohon doa restu dari semuanya. Tidak lupa doa dari anak-anak yatim. “Saya akan selalu memperhatikan anak-anak yatim di Pabean. Kami akan memperhatikan keberlangsungan pendidikan,” ucapnya.

Acara tersebut juga diisi dengan pengajian. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim serta ramah tamah bersama Wakil Bupati Sidoarjo Subandi.

Subandi menyampaikan, pihaknya mewakili seluruh masyarakat dan pemerintah daerah Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 tahun kepada Kepala Desa Pabean Sriatun. Semoga selalu diberi umur panjang serta kesehatan oleh Nya.

“Semoga dengan menyantuni anak yatim piatu ini menjadi amal ibadah, sehingga bisa memimpin Pabean dan membawa amanah rakyat sebaik-baiknya dan dijabah segala hajatnya,” pungkas Subandi. (adv/din/rd)

Final, Bawaslu Sidoarjo Nyatakan Ketua Dewan Tak Lakukan Pelanggaran

by RadarJatim - 9 Agustus 2023 in Politik

0 0



Panwascam dan Bawaslu Sidoarjo saat melakukan klarifikasi ke H. Usman beberapa waktu yang lalu.



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan terkait video H. Usman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo saat menjadi narasumber di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

Haidar Munjid, Ketua Bawaslu Sidoarjo mengatakan bahwa setelah melakukan klarifikasi ke beberapa pihak, Bawaslu Sidoarjo bersama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sidoarjo melakukan kajian mendalam



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

terkait video presentasi tersebut.

“Panwascam (Sidoarjo, red) maupun Bawaslu Sidoarjo menyatakan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran. Alasannya, H. Usman terbukti tengah melaksanakan tugas kedinasan, bukan kampanye,” kata Haidar Munjid, Rabu (09/08/2023).

Dijelaskan oleh Haidar bahwa salah satu yang menjadi dasar dalam kajian adalah pasal 268 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 2017, yaitu kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.

Selain itu, dalam pasal 270 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPRD, dan orang seorang dan/atau organisasi yang ditunjuk.

Dan didalam peristiwa tersebut, posisi terlapor bukan sebagai pelaksana kampanye sebagaimana kualifikasi dalam norma a quo.

“Dalam penelusuran dan klarifikasi, diperoleh fakta bahwa terlapor diundang oleh BKD Sidoarjo sebagai narasumber. Keterangan





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

tersebut bersesuaian dengan pengakuan terlapor. Dapat disimpulkan bahwa terlapor memang sedang menjalankan tugas kedinasan,” jelasnya.

Untuk itu, berdasarkan pada hal-hal tersebut maka dihasilkan dua kesimpulan, yaitu penelusuran atas dugaan kampanye diluar masa kampanye dan/atau kampanye diluar jadwal tidak dapat dilanjutkan.

“Serta informasi awal terhadap perkara a quo tidak dapat dilanjutkan sebagai temuan pengawas Pemilu,” terangnya.

Haidar menambahkan bahwa penanganan laporan ini dilakukan oleh Panwascam Sidoarjo dengan didampingi Bawaslu Sidoarjo. Model penanganan seperti ini akan menjadi *role model* Bawaslu Sidoarjo periode selanjutnya.

”Kalau terjadi di kecamatan, cukup ditangani kecamatan,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa permasalahan ini muncul pada Juli 2023 lalu, dimana telah beredar video presentasi H. Usman saat menjadi narasumber di BKD Sidoarjo dengan materi terkait persiapan menghadapi pensiun.



Ketua Kwardcab Sidoarjo Berangkatkan Kontingen Raimuna Nasional XII

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 32 orang anggota Pramuka Penegak dan Pandega peserta Raimuna Nasional XII Kontingen Sidoarjo, diberangkatkan oleh Ketua Kwardcab Sidoarjo Kak H. Subandi SH, Rabu (9/8) di Pendopo Delta Wibawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan didampingi oleh Ketua Harian Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sidoarjo, Kak DR. H. Mustain Baladan, M.Pd.I. Kak Subandi menerima seluruh peserta dan memotivasi agar mereka tetap bersemangat dan menjaga kesehatan selama pelaksanaan kegiatan di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta, pada tanggal 14 s.d 21 Agustus 2023.

"Jaga nama baik sekolah, orang tua dan Kabupaten Sidoarjo. Karena adik-adik peserta ini adalah pramuka pilihan dari gugus depannya masing-masing. Ikutilah seluruh kegiatan yang ada serta selalu kembangkan kerisama tim dan jangan lupa untuk selalu memotivasi antara satu dengan

yang lain," kata kak Subandi memompa semangat adik-adik.

Turut hadir juga dalam pemberangkatan kali ini, para Kepala Sekolah dari tiap peserta dan orang tua peserta didik. Sepintas, nampak kebahagiaan dan kebanggaan tersempit dalam raut wajah mereka melihat

anak-anak dan peserta didiknya berangkat mewakili sekolahnya mengikuti even kegiatan nasional 5 tahun sekali ini.

Dalam arahnya, Kak Subandi yang juga Wakil Bupati Sidoarjo ini menyampaikan, ilmu-ilmu yang adik-adik dapatkan selama

mengikuti kegiatan di Cibubur Jakarta, setelah kembali ke Sidoarjo, harus diajarkan dan dikembangkan di gugus depannya masing-masing untuk mendorong kemajuan gerakan pramuka di Sidoarjo.

"Hari ini menjadi momen berharga untuk adik-adik sekalian, dimana adik-adik akan kami berangkatkan sebagai peserta raimuna nasional 12, dan ini sebuah kebanggaan dan kehormatan tersendiri," arahan Subandi. Dihubungi terpisah disela-sela kegiatan, Ketua DKC Sidoarjo Kak Anang Ahmad Muzzaki menyampaikan bahwa, melalui Raimuna Nasional ini, akan terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan dan mendorong kemajuan pramuka penegak di Sidoarjo.

"Pengalaman mengikuti Raimuna Nasional XII tahun 2023 ini tidak akan datang kali kedua, oleh karenanya kami akan totalitas memberikan yang terbaik untuk pramuka Sidoarjo," ujarnya. [ach.why]



Wakil Bupati Subandi mengenakan jaket peserta simbolis berangkatnya kontingen ke Cibubur.

ahmad suprayogi/bhirawa

HARIAN
Bhirawa

Disporapar Beri Pelatihan Videography bagi Pemuda Kre

Sidoarjo, Bhirawa

Puluhan pemuda Sidoarjo yang terdiri dari perwakilan Guk Yuk, Forum Pemuda, Pemuda Anshor, Dewan Pemuda dan para mahasiswa serta perwakilan Pelingasih (Pemuda Peduli Lingkungan Asri

dan Bersih) mendapatkan pelatihan membuat video konten kreator yang baik dan bermanfaat.

Kegiatan yang dikemas dalam Pelatihan Videography, digagas oleh Disporapar (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parwisata) Sidoarjo

tersebut, dilaksanakan selama dua hari, tepatnya pada 9-10 Agustus 2023, di Hotel Luminor Sidoarjo. Bertujuan untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo secara visual.

Prosesi pembukannya dilakukan langsung oleh Kepala Disporapar Drs. Joko Supriyadi dengan menghadirkan para pemateri dari anggota DPRD Sidoarjo, yakni Ketua Komisi D DPR Sidoarjo Abdillah Nasih dan salah satu anggota Komisi D, Ainun Jariyah serta para praktisi-praktisi muda tentang konten kreator.

Usai memberikan pengarahan pembukaan, Joko Supriyadi menjelaskan kalau mereka, para peserta ini setelah mendapatkan pembekalan, dilanjut untuk praktek pengambilan gambarnya di Muse-

um Negeri Mpu Tantular pa wisata religi Makam A yang bertempat di Komplek Optonik II Puspalad dokerto Buduran Sidoarjo

Ia katakan kalau wilayah Sidoarjo banyak wilayah yang bisa wisata, mulai dari wisata alam ta religi hingga wisata-wisata. Diantaranya taman-taman candi, wisata peninggalan yaitu pabrik-pabrik gula t juga wisata belanja.

"Diharapkan para peserta terdiri dari para pemuda bisa mempromosikan secara Karena mereka juga sudah membuat konten-konten video hingga dengan adanya pelatihan ini, mereka bisa membuat video lebih baik lagi dan faat bagi Sidoarjo," harap priyadi. [ach.why]



ahmad suprayogi/bhirawa

Kepala Disporapar Sidoarjo sedang memberi pengarahan kepada para peserta pelatihan.

HARIAN
Bhirawa

Peserta Plesiran Misterius ke Nganjuk Terancam Dipecat

Admin
Wednesday, August 9, 2023, August 09, 2023 WIB



Para anggota Paguyuban PPS Kecamatan Sidoarjo berfoto bersama Bupati Nganjuk di pendopo kabupaten.

DNN, SIDOARJO – Beberapa orang diantara para peserta plesiran misterius Paguyuban PPS se Kecamatan Sidoarjo ke Nganjuk akhir Juli lalu terancam diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Selain itu KPU Sidoarjo juga akan memberikan peringatan keras pada lainnya.

“Bisa satu atau dua orang yang diberhentikan. Sedangkan yang lain tetap ada sanksi sesuai bobot kesalahannya masing-masing. Karena peran tiap-tiap orang dalam kasus ini berbeda-beda,” ungkap Ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/08/2023) sore tadi.

Dijelaskannya, saat ini KPU Sidoarjo sudah membentuk Tim Pemeriksa atas kasus plesiran misterius ini yang terdiri dari tiga orang anggota komisioner. Merekalah yang nantinya akan melakukan pendalaman terhadap informasi awal yang didapat dari proses pemeriksaan awal yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Kira-kira dua atau tiga hari lagi tim ini bekerja hingga membuat kesimpulan akhir. Dan hasilnya akan kami plenokan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan,” imbuh Iskak yang didampingi Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih, SDM dan Parmas) KPU Sidoarjo, Fauzan Adim.

Dan selama masa kerja Tim Pemeriksa tersebut, untuk sementara KPU Sidoarjo akan memberhentikan personel PPK dan PPS Kecamatan Sidoarjo yang akan diperiksa dari tugas dan wewenangnya di lembaga penyelenggara Pemilu itu.

Lebih lanjut Iskak menjelaskan, sebenarnya dirinya sudah mendengar informasi tentang rencana keberangkatan anggota PPS ke Nganjuk tersebut sejak sehari sebelumnya. Selanjutnya, ia mengambil langkah cepat, yakni berkoordinasi dengan koleganya di tlatah Anjuk Ladang.

Restoran Pelanggar Pajak Ditempeli Stiker Peringatan

Terindikasi Memodifikasi Alat Perekam Transaksi

SIDOARJO - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo menempelkan stiker peringatan ke salah satu restoran di Jalan Taman Pinang Indah kemarin (9/8). Restoran tersebut terindikasi memanipulasi pajak. Sejak awal tahun ini, sudah ada tujuh restoran yang ditempeli stiker bertulisan "objek pajak ini dalam pengawasan BPPD Sidoarjo" tersebut. Penyidik BPPD Sidoarjo Surendro Nurbawono mengatakan, pihaknya menempelkan stiker karena wajib pajak tersebut sudah diberi peringatan, tapi tidak mengubris. "Wajib pajak ini ter-



DINAS MAULANA/JAWA POS

indikasi melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2010 dan Perda Nomor 6 Tahun 2021," katanya. Restoran tersebut diduga tidak melaporkan omzet sebagaimana mestinya. "Ada indikasi yang dilaporkan hanya sepertiga dari omzet," ujarnya. Artinya, pajak daerah yang seharusnya dibayar masih kurang.

Rendro mengatakan, pihaknya juga sudah memasang alat perekam transaksi untuk memonitor transaksi di restoran tersebut. Hasilnya, ada kejanggalan. "Ada indikasi banyak transaksi yang tidak terekam. Mereka terindikasi mengutak-atik alat pemodifikasi data transaksi," paparnya.

Pihaknya sempat memanggil pengelola, tapi mereka tidak datang. Selain menempelkan stiker, pihaknya kembali melakukan pemanggilan kemarin. Dengan begitu, kekurangan pembayaran bisa segera dilunasi.

Rendro menyebut sejak awal tahun ini sudah ada tujuh restoran yang ditempeli stiker.

BELUM BAYAR PAJAK: Surendro Nurbawono memasang stiker di tempat usaha yang terindikasi menunggak pajak di Taman Pinang Indah (TPI) kemarin.

Kasusnya mirip. "Ada empat resto dan kafe yang terindikasi melanggar juga. Kami akan tindaklanjuti juga," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya berupaya menekan adanya wajib pajak yang curang. Karena itu, alat perekam transaksi juga terus dipasang di sejumlah restoran. "Saat ini sudah terpasang di 355 restoran. Dalam minggu ini kami kembali tambah pemasangan," katanya.

Indri Hari, pengelola restoran di Taman Pinang, berdalih belum pernah memungut pajak 10 persen ke pelanggannya. "Baru seminggu kami masukkan 10 persen pajaknya ke *billing*," ujarnya. Dia menyebutkan, pihaknya segera menyelesaikan masalah tersebut dan memenuhi panggilan BPPD Sidoarjo. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Polisi Adakan Baksos Kemerdekaan di Dusun Kepetingan

Sidoarjo, Memorandum

Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78, semangat men-
ebar kepedulian sesama digelorkan Polresta Sidoarjo dan jajarannya.

Salah satunya menggelar bakti sosial (baksos) berupa penyaluran paket sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembagian bendera merah putih ke rumah-rumah warga.

Selasa (8/8) petang, menggunakan kendaraan roda dua rombongan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro beserta pejabat utama dan kapolsek jajaran melintasi jalan pertambakan menuju Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran.

Di Dusun Kepetingan yang mayoritas warganya sebagai nelayan

dan petani tambak, Polresta Sidoarjo menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis serta kapolresta membagikan sembako dan bendera merah putih *door to door* ke rumah warga.

Kusumo menjelaskan, menyambut Dirgahayu ke-78 Kemerdekaan RI pihaknya turun langsung ke wilayah terpencil untuk melaksanakan baksos kemerdekaan. Harapannya dapat menumbuhkan semangat perjuangan bagi anggotanya, dan dapat mendekatkan Polri dengan masyarakat.

"Di bulan kemerdekaan, kita mengadakan baksos ke wilayah jauh

dari perkotaan yang jangkauannya sulit. Pada kesempatan ini kami juga membagikan bendera merah putih ke rumah-rumah warga sembari memberikan imbauan kamtibmas," jelas kapolresta.

Semangat nasionalisme menurut Kusumo penting terus digelorkan pada masyarakat. Harapannya nilai-nilai luhur perjuangan dapat diteladani bersama, terutama guna mewujudkan kondusifitas kamtibmas tetap aman dan damai.

Warga Kepetingan antusias menyambut kegiatan baksos kemerdekaan yang diadakan Polresta Sidoarjo. Mulai siang tak sedikit yang datang untuk pengecekan kesehatan gratis lalu petangnya mendapatkan paket sembako dan bendera merah putih. (jok/nov)



Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengamati warga Kepetingan melakukan pemeriksaan gratis dalam baksos kemerdekaan.

CS Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TPA Jabon Akan Segera Tagih Biaya Layanan Sampah Kepada TPS

SIDOARJO - Anggapan bahwa biaya layanan sampah di Sidoarjo digratiskan mulai Februari 2023 hingga sekarang itu tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat, bahwasanya biaya layanan sampah akan segera ditagih ke TPS 3R maupun TPST.

Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig mengatakan bahwa penagihan biaya layanan sampah akan segera dilaksanakan. Hal tersebut menunggu Revisi Perbup No 116 tahun 2022 tentang pedoman penghitungan pengelolaan persampahan di Sidoarjo yang segera tuntas. Saat ini, sudah proses pembahasan akhir.

"Rencananya, akan ada penurunan tarif, Namun berapa nominalnya nanti ketika sudah fix akan kami sampaikan," ujarnya singkat, Rabu (9/8/23).

Masih lanjut Amig, revisi perbup tersebut sesuai dengan hasil diskusi bersama antara paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan juga Bupati Sidoarjo pada 16 Mei silam.

"Tarif baru sudah kita kaji bersama, dan sekarang sudah tahap akhir," jelasnya.

Selama proses revisi ini, layanan persampahan tetap berjalan. Termasuk, hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat menambahkan, pihaknya sampai saat ini juga tetap mencatat seluruh sampah yang masuk ke TPA dari TPST. Namun, pembayarannya dilakukan nanti setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi Perbup.

Jika tidak direvisi, maka tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per-ton sebesar Rp. 150.000. Namun, tarif tersebut nantinya direvisi.

"Kami tetap melakukan rekaptulasi terhadap layanan angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari argo tetap jalan," kata Fajri I.

Sementara ini, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya



Aktivitas TPA Jabon Sidoarjo Rabu (9/8/23).

ke TPST. Karena perbup masih dibahas.

"Bukan berarti kirim sampah ke TPA gratis. Tetap bertarif tapi peragibannya nanti ditotal setelah revisi," ucapnya.

Dirinya menampik anggapan

bahwa mengirim sampah ke TPA tidak dikenakan biaya sama sekali selama proses revisi Perbup ini. Sehingga, TPST tidak asal membuang sampah. Mereka akan mengolah dulu. Sebab semakin sedikit sampah yang dibuang ke TPA,

semakin sedikit pula biaya yang harus mereka keluarkan.

"Kalau mau biaya ringan, harusnya sampah diolah di TPS semaksimal mungkin, supaya tidak ada residu yang dibuang ke Jabon," pungkasnya. ● Loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pastikan Nasib Semua Tenaga Honorer Aman

SIDOARJO - Nasib 8.753 pegawai honorer di Sidoarjo dipastikan aman. Mereka tetap bisa bekerja seperti saat ini dan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Namun, tidak boleh ada penambahan pegawai honorer baru.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo M. Makhmud menyatakan, pihaknya sudah konsultasi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) di Jakarta. Hasilnya, Kemen PAN-RB tidak menghapus status pegawai honorer.

Batas akhir kerja pegawai honorer pada 28 November 2023 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penghapusan Tenaga Non-ASN atau Honorer juga belum diberlakukan. "Jadi, sudah tidak ada lagi isu penghapusan tenaga honorer," kata Makhmud.

Formasi tenaga honorer di Sidoarjo saat ini juga tidak ada perubahan. "Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang sekarang," katanya. Namun, sesuai arahan dari Kemen PAN-RB, tidak boleh ada penambahan tenaga honorer baru. Sementara ini memanfaatkan formasi tenaga honorer yang sudah ada.

Meskipun tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer, tahun ini Pemkab Sidoarjo bakal merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sekretaris BKD Sidoarjo Zainul Arifin Umar menyatakan, formasi PPPK Sidoarjo tahun ini sebanyak 129. Terdiri atas 65 tenaga kesehatan dan 64 guru. Hanya dua formasi tersebut.

Formasi tenaga teknis tidak ada. "Untuk di daerah, termasuk Sidoarjo, hanya PPPK. Tidak ada formasi CPNS," katanya. Terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). (uzi/c12/any)

Jawa Pos

Tarif Layanan TPA ke TPS Tetap Berjalan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo saat ini sedang menggodok revisi Peraturan Bupati No. 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan di Sidoarjo segera tuntas. Dalam revisi tersebut, pemerintah bakal menurunkan tarif persampahan.

Revisi perbup tentang pengelolaan sampah dilakukan setelah adanya diskusi bersama antara bupati Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan puyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pada 3 Mei 2023. “Ada perubahan arif. Namun berapa nominalnya nanti ketika sudah fix akan kami sampaikan,” jelas Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig.

Menurutnya, revisi perbup

tersebut dalam waktu dekat akan segera selesai. Meski demikian, selama proses revisi ini, layanan persampahan tetap berjalan. Termasuk, hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat mengatakan, pihaknya sampai saat ini juga tetap mencatat seluruh sampah yang masuk ke TPA dari TPST. Namun, pembayarannya dilakukan setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi Perbup.

“Selama ini tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton sebesar Rp. 150.000. Nah, tarif tersebut yang akan direvisi. Kami tetap melakukan

rekapitulasi terhadap layanan angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari, argo tetap jalan,” kata Hajid.

Selama ini, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya ke TPST. Karena perbup masih dibahas. “Bukan berarti kirim sampah ke TPA gratis. Tetap bertarif tapi penagihannya nanti ditotal setelah revisi,” jelasnya.

Dia menampik bahwa pengiriman sampah ke TPA tidak dikenakan biaya sama sekali selama proses revisi Perbup. Sehingga, TPST tidak asal membuang sampah. “Mereka akan mengolah dulu. Sebab semakin sedikit sampah yang dibuang ke TPA, semakin sedikit pula biaya yang harus mereka keluarkan,” tandasnya. (cat/rd)



ondisi tempat Pembuangan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon.

Tarif Pengelolaan Sampah di Sidoarjo Bakal Turun

SIDOARJO, SURYA - Tarif atau biaya pengelolaan sampah di Sidoarjo bakal diturunkan. Perubahan tersebut dilakukan dalam revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 116 Tahun 2022 tentang pedoman penghitungan pengelolaan persampahan di Sidoarjo.

Saat ini, revisi itu sudah masuk proses pembahasan akhir. Dalam waktu dekat, diperkirakan pembahasan selesai dan perbup bisa disosialisasikan ke masyarakat.

Revisi itu juga melalui proses pembahasan bersama antara paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan juga Bupati Sidoarjo pada 16 Mei lalu.

Kepala DLHK Sidoarjo, M Bahrul Amig yakin proses revisi Perbup tersebut dalam waktu dekat akan segera selesai.

"Ada perubahan tarif. Namun berapa nominalnya nanti ketika sudah fix akan kami sampaikan," katanya Rabu (9/8).

Selama proses revisi ini, disebutkan layanan persampahan di Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan seperti biasa. Termasuk, hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat mengatakan, pihaknya sampai saat ini juga tetap mencatat seluruh sampah yang masuk ke TPA dari TPST.

Namun, pembayarannya dilakukan nanti setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi Perbup. Jika tidak direvisi, maka tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per-ton sebesar Rp 150.000.

"Kami tetap melakukan rekapitulasi terhadap layanan



TPA JABON - Penanganan sampah di TPA Jabon Sidoarjo yang ditagani Pemkab Sidoarjo, Rabu (9/8).

angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari, argo tetap jalan," kata Hajid.

Selama ini, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya ke TPST. Karena perbup masih dibahas.

"Bukan berarti kirim sampah ke TPA gratis. Tetap bertarif tapi penagihannya nanti ditotal setelah revisi,"

tandasnya.

Pihaknya menampik anggapan bahwa mengirim sampah ke TPA tidak dikenakan biaya sama sekali selama proses revisi Perbup ini. Sehingga, TPST tidak asal membuang sampah.

Mereka akan mengolah dulu. Sebab semakin sedikit sampah yang dibuang ke TPA, semakin sedikit pula biaya yang harus mereka keluarkan. (ufi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Nilai Tarif TPA Jabon setelah Ada Revisi Perbup

SIDOARJO-Revisi Perbup No 116 Tahun 2022 tentang pedoman penghitungan pengelolaan persampahan di Sidoarjo segera tuntas. Saat ini, sedang pembahasan akhir. Rencananya, ada penurunan tarif.

Revisi perbup tersebut sesuai hasil diskusi bersama antara paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan juga Bupati Sidoarjo pada 16 Mei silam.

Kepala DLHK Sidoarjo M Bahrul Amig menjelaskan, revisi perbup tersebut dalam waktu dekat akan segera selesai. "Ada perubahan tarif. Namun berapa nominalnya nanti

ketika sudah fix akan kami sampaikan," katanya.

Selama proses revisi ini, layanan persampahan tetap berjalan. Termasuk, hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat mengatakan, pihaknya sampai saat ini juga tetap mencatat seluruh sampah yang masuk ke TPA dari TPST. Namun, pembayarannya dilakukan nanti setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi perbup.

Jika tidak direvisi, maka tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per-ton sebesar Rp 150 ribu. Namun, tarif tersebut nantinya direvisi.

"Kami tetap melakukan rekapitulasi terhadap layanan angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari, argo tetap jalan," kata Hajid.

Selama ini, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya ke TPST. Karena perbup masih dibahas.

"Bukan berarti kirim sampah ke TPA gratis. Tetap bertarif tapi penghitungannya nanti ditotal setelah revisi," katanya. (sai/vga)



PERLU DIMINIMALISIR: Kondisi pembuangan sampah di TPA Jabon.





Target PAD Turun di Perubahan APBD, Sektor Pajak Malah Naik

KOTA-Pos pendapatan daerah dalam Kerangka Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Sidoarjo mengalami peningkatan. Meskipun demikian, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Dari Rp 1.935 triliun menjadi Rp 1.905 triliun.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Deny Haryanto menjelaskan bahwa penurunan PAD disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari pos retribusi. Termasuk retribusi parkir.

Menurut Deny, permasalahan hukum pada pengelolaan parkir yang masih berlangsung menjadi alasan utama penurunan retribusi. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa pos pajak daerah mengalami kenaikan yang signifikan.

● Ke Halaman 10

BELUM TUNTAS: Salah satu titik parkir di Sidoarjo yang menjadi potensi pendapatan daerah.



Target PAD Turun...

Dalam APBD 2023, target pajak daerah awalnya sebesar Rp 1.130 triliun. Namun, dalam perubahan APBD, target tersebut mengalami kenaikan

menjadi Rp 1.215 triliun," ujar Ketua DPD PKS Sidoarjo tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono menyatakan optimisme dalam mencapai target

pendapatan. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup besar.

Ari merasa yakin bahwa target tersebut dapat tercapai karena pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis.

Termasuk upaya jemput bola dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan yang selalu menjadi andalan setiap tahun.

"Kami terus melakukan pendekatan aktif kepada wajib pajak, terutama dalam hal pajak bumi dan bangunan,"

imbuhnya.

Peningkatan penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan serta langkah-langkahnya yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan dan kinerja daerah. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hidupkan Nilai Sejarah, Percantik Monumen Pusat Kota

KOTA-Dalam upaya mem- perindah kota dan menghi- dupkan kembali nilai sejarah lokal, Dinas Lingkungan Hi- dup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo menghidupkan lagi sejumlah monumen yang ada di pusat kota. Salah satu mon- umen yang kembali hidup adalah yang terletak di bun- daran kawasan Perumahan Gading Fajar.

Sebagai bagian dari ini- siatif tersebut, fasilitas air mancur di monumen itu di- nyalakan kembali. Meskipun upaya ini adalah langkah positif dalam mempercantik ke- ruan kota, masih terdapat bebe- rapa aspek yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Salah satunya adalah pa- tung udang yang menjadi ba- gian dari monumen tersebut. Saat ini masih dalam kondisi rusak. Menurut Kepala Bi- dang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) Hery Santoso, monumen tersebut telah mengalami beberapa revitalisasi. Mulai dari pe- masangan pagar hingga tanamannya.

Namun patung udang yang menjadi ciri khasnya masih dalam keadaan ru- sak. Sayangnya, hingga saat ini belum ada anggaran yang disiapkan khusus untuk perbaikan patung udang tersebut. "Belum bisa kami pastikan apakah



MENYALA: Air mancur di monumen udang dan bandeng di Gading Fajar saat sedang dinyalakan.

perbaikan tersebut akan dapat dilaksanakan dalam tahun ini, ujarnya.

Langkah untuk menghi- dupkan kembali monumen

di pusat kota mendapat apresiasi positif dari ma- syarakat. Mereka berharap bahwa pemulihan monu- men-monumen tersebut

akan semakin memperkaya panorama kota dan membe- rikan nuansa sejarah yang mendalam bagi warga.

● Ke Halaman 10



Hidupkan Nilai Sejarah,...

Dengan adanya langkah proaktif dari DLHK Sidoarjo itu, diharap- kan bahwa pemerintah dan ins- tansi terkait akan terus berupaya

menjaga warisan budaya dan sejarah kota.

Serta berinvestasi dalam upaya perbaikan yang dapat meningkatkan nilai estetika dan keindahan Kota Delta secara keseluruhan. (nis/vga)





BERSUARA: Kelompok masyarakat melakukan demo di depan Pendapa Delta Wibawa.

Gelar Aksi Tuntut Transparansi Soal Lahan Makam REI

KOTA-Transparansi ketersediaan lahan pemakaman yang dikelola Yayasan Makam Real Estate Indonesia (YMREI) Sidoarjo jadi polemik. Salah satunya dipersoalkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM Mojopahit Jatim.

Ketua LSM Mojopahit, Andreas Sutikno mengaku penyediaan lahan pemakaman yang dikelola YMREI kurang transparan. Terutama yang berada di TPU Delta Praloyo.

CS Dipindai dengan CamScanner

● Ke Halaman 10

Gelar Aksi Tuntut...

Dipertanyakan oleh Subbag Perencanaan dan Pembangunan, Rinaldi Huma Sekretaris DPRD Sidoarjo, "Artinya YMREI ini masih kurang sekitar 4,5 hektar lagi untuk lahan pemakaman. Dan itu harus dicarikan lahan di area Sidoarjo timur," ucapnya.

Sementara, Kepala Perkim CKTR Sidoarjo Bachruni Aryawan menjelaskan, untuk penyediaan lahan makam tersebut memang menjadi kewajiban pemerintah.

Menurutnya Pemkab Sidoarjo tidak bisa melakukan audit terkait hal tersebut selama lahan tersebut belum

Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo Bachruni Aryawan menyerahkan kepada pemerintah daerah.

Desa Gamping Rowo Kecamatan Tarik," ucapnya.

Bachruni menegaskan bahwa saat ini sedang diproses di BPN untuk dialihkan ke REI. Setelah itu baru diserahkan ke Pemkab

"Pesan dari Pak Bu sudah harus selesai. Ke kepentingan masyarakat tegasnya. (sai/vga)

Betonisasi Kawasan Geluran-Suko Dikebut

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo terus mengebut proyek betonisasi Jalan Geluran Taman-Suko dengan panjang 1.570 meter dan lebar 7 meter. Hal ini supaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Selasa (8/8), mengatakan, satu per satu proyek betonisasi di beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki menunjukkan progres membanggakan.

“Salah satunya proyek betonisasi jalan penghubung Desa Geluran, Kecamatan Taman-Desa Suko, Kecamatan Sukodono yang sudah memasuki tahap pemasangan U-Dicth (drainase jalan kanan-kiri),” ujarnya.

Ia mengatakan, progres proyek betonisasi untuk jalan desa penghubung Desa Geluran Kecamatan Taman dan Desa Suko, Kecamatan Sukodono ini merupakan jalan padat kendaraan dan padat pemukiman. Jalan ini menjadi jalan utama masyarakat menuju Jalan Raya Taman. (ant/rd)



Proyek betonisasi jalan penghubung Desa Geluran, Kecamatan Taman-Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MASIH
DIPERTAHANKAN:
Warga
menyeberangi
Jembatan Klurak
yang terbuat dari
kayu di Kecamatan
Candi kemarin.
Di sebelahnya,
pembangunan
jembatan baru
masuk tahap
pemasangan
perancah.

DIMAS MAULANA/JAWA POS

Jembatan Klurak Lama Tak Dirobuhkan

SIDOARJO - Proses pembangunan Jembatan Klurak terus berlangsung. Saat ini pekerja sedang menggarap perancah atau struktur sementara penyangga jembatan. Karena akses jembatan padat, jembatan lama yang

terletak di Desa Bilongdowo dan Desa Klurak di Kecamatan Candi tak dirobuhkan. Solusinya, jembatan

baru dibangun di sisi timurnya, bersebelahan dengan jembatan lama.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Rizal Asnan mengatakan, jembatan tersebut hanya di akses. Terutama warga yang akan ke area tambak dan menyeberang dari desa

satu ke yang lainnya. Jika dibongkar, warga harus memutar cukup jauh. Padahal, jembatan tersebut menjadi akses ekonomi warga. Alhasil, kemarin (9/8) masih banyak warga yang melintas.

"Jadi, yang lama tidak dirobuhkan dulu. Digarap di area sebelahnya dulu," kata Rizal. Ketika jembatan

baru nanti mulai terbangun, jembatan lama akan dirobuhkan.

Rizal mengatakan, saat ini progres pembangunan jembatan sepanjang 24 meter dengan lebar 2,5 meter itu lebih cepat dari target. "Saat ini masuk masa minggu ke-9 pengerjaan, sudah terealisasi 18,79 persen," katanya. (uzi/c6/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MASIH ADA: Bekas rumah dinas Pabrik Gula Sruni di Kecamatan Gedangan yang berada di sisi timur rel kereta, sedangkan pusat pabrik berada di kompleks Batalyon Arhanud 08.

Jejak PG Sruni di Gedangan

SIDOARJO - Kecamatan Gedangan sejak dulu memang dikenal sebagai wilayah industri. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya sebuah pabrik pembuat gula sejak masa kolonial Belanda.

PG Sruni di Gedangan bahkan bisa dibilang lebih tua daripada PG Krembung yang hingga kini masih aktif. Dari arsip Belanda yang dimiliki Komunitas Sidoarjo Masa Kuno diketahui bahwa PG Sruni berdiri sejak 1842 atau lima tahun sebelum PG Krembung.

Menurut pegiat sejarah Sidoarjo Agung Widyanja, PG Sruni terbagi dua sisi, yaitu di timur rel kereta dan di barat. "Sedangkan bagian barat pabrik kini jadi kompleks Batalyon Arhanud 08," tuturnya.

Sisi timur diduga merupakan lokasi gudang sekaligus tempat bagi rumah dinas administrasi. Salah satu rumah dinas administrasi yang masih tersisa dari PG Sruni berada tepat di belakang restoran cepat saji.

Bangunannya kini tertutup tembok akibat adanya pelebaran *frontage road* Gedangan. Rumah tersebut, menurut Agung, kini milik seorang anak pensiunan TNI. "Rumahnya memang khas dengan gaya Belanda. Cuma catnya yang diubah menjadi hijau," katanya.

Agung mengatakan, belum banyak catatan mengenai kepemilikan hingga berhenti beroperasinya PG Sruni itu pada masa kolonial. Terakhir diketahui pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lokasi PG Sruni dijadikan gudang senjata.

"Di Sruni ini kabarnya jadi pusat pergudangan senjata, lalu dipindah ke PG Buduran," tuturnya.

Bahkan, pada akhir masa pendudukan Jepang, PG Sruni kabarnya juga sempat digunakan sebagai pabrik karet. (eza/c7/any)

Jawa Pos

Kejar Target Ontime Kebut Proyek Betonisasi Jalan Geluran Taman-Suko

Sidoarjo, Pojok Kiri

Satu persatu proyek betonisasi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo yang sedang diperbaiki menunjukkan progres yang membanggakan. Salah satunya proyek betonisasi jalan penghubung Desa Geluran Kecamatan Taman - Desa Suko Kecamatan Sukodono yang sudah memasuki tahap pemasangan U-Ditch (drainase jalan kanan-kiri), Selasa, (8/8/2023).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan progres proyek betonisasi untuk jalan desa penghubung Desa Geluran Kecamatan Taman dan Desa Suko, Kecamatan Sukodono ini merupakan jalan padat kendaraan dan padat pemukiman dimana jalan ini menjadi jalan utama masyarakat menuju jalan raya Taman.

“Atas dasar urgensi tersebut, kami terus me-

antau progres tiap proyek. Saat ini untuk betonisasi Geluran, Taman - Suko, Sukodono ini sudah masuk tahap pemasangan U-Ditch dan sebagian lainnya sudah dilakukan pengecoran pondasi lapis bawah,” jelas Gus Muhdlor.

Selama dalam pengerjaan U-Ditch dan pengecoran pondasi lapis bawah ini jalan ditutup untuk kendaraan roda empat. Pengendara bisa memilih untuk melewati jalan alternatif.

“Lagi-lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini, yang mana masyarakat harus melalui jalan alternatif yang mungkin lebih jauh dari sebelumnya. Namun kesabaran masyarakat dan ketaatan masyarakat nantinya akan membuahkan hasil proyek selesai tepat waktu, sehingga bisa menikmati jalan yang lebih baik,” ucapnya.



Progres betonisasi Geluran Taman Suko.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan jalan dengan panjang 1.570

meter dan lebar 6-7 meter tersebut kami targetkan selesai akhir Desember 2023.

“Kami terus kebut pengerjaan proyek ini agar masyarakat

segera bisa menikmati jalan dengan kondisi yang lebih baik untuk akses jalan yang kami rasa sangat darurat ini,” tegas Dwi. (Khol/dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, SH, SIK saat tebar benih ikan lele di kolam bioflok desa Bangah.

Program Ketahanan Pangan, Kapolresta Sidoarjo Tebar 5000 Benih Ikan Lele di Desa Bangah

Sidoarjo, Pojok Kiri

Kapolresta Sidoarjo Komisariss Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro bersama pejabat utama, kapolsek jajaran dan perangkat Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, melakukan penebaran 5.000 benih ikan lele di kolam bioflok lahan kolam renang Raden Aryo Bebangah, Desa Bangah, Selasa (8/8/2023).

Melalui penebaran benih ikan lele ini, menurut Kapolresta Sidoarjo dapat mendukung program ketahanan pangan. Nantinya apabila siap dipanen, manfaatnya dapat kembali bagi masyarakat.

“Kami ajak masyarakat di tingkat desa untuk dapat mendukung program ketahanan pangan yang juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui penebaran benih ikan lele,” ujarnya.

Ketahanan pangan juga diharapkan mengundang semangat warga di desa-desa untuk dapat memanfaatkan lahan kosong, atau bekerjasama dengan perangkat desa maupun peran Bhabinkamtibmas guna membudidayakan ikan atau lainnya.

Kepala Desa Bangah Bambang Handoko menyambut baik, semangat ketahanan pangan yang dicanangkan Kapolresta Sidoarjo di wilayahnya. Sehingga mampu membangun ketahanan pangan, dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. (Khol/Fs)

Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perlu Revisi, TPA Jabon Akan Segera Tagih Biaya Layanan Sampah ke TPS

9 Agustus 2023

< Bagikan



Aktivitas TPA Jabon Sidoarjo, Rabu (9/8/23). (FT/LOETFI)

SIDOARJO | duta.co – Adanya anggapan biaya layanan sampah di Sidoarjo digratiskan mulai Februari 2023 hingga sekarang, dibantah Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat. Ia mengatakan, biaya layanan sampah akan segera ditagih ke TPS 3R maupun TPST.

Kepala DLHK Sidoarjo, M. Bahrul Amig, mengatakan, bahwa penagihan biaya layanan sampah akan segera dilaksanakan. Hal tersebut menunggu Revisi Perbup No 116 tahun 2022 tentang pedoman penghitungan pengelolaan persampahan di Sidoarjo yang segera tuntas. Saat ini, sudah proses pembahasan akhir.

"Rencananya, akan ada penurunan tarif, Namun berapa nominalnya nanti ketika sudah fix akan kami sampaikan," ujarnya singkat, Rabu (9/8/23).

Masih lanjut Amig, revisi perbup tersebut sesuai dengan hasil diskusi bersama antara paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan juga Bupati Sidoarjo pada 16 Mei silam. "Tarif baru sudah kita kaji bersama, dan sekarang sudah tahap akhir," jelasnya.

Selama proses revisi ini, layanan persampahan tetap berjalan. Termasuk hitungan tonase sampah yang masuk dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat menambahkan, pihaknya sampai saat ini juga tetap mencatat seluruh sampah yang masuk ke TPA dari TPST. Namun, pembayarannya dilakukan nanti setelah sudah ada tarif yang baru sesuai hasil revisi Perbup.

Jika tidak direvisi, maka tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per-ton sebesar Rp 50.000. Namun, tarif tersebut nantinya direvisi.

DUTA
SIDOARJO



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kami tetap melakukan rekapitulasi terhadap layanan angkutan dan pemrosesan akhir terhadap TPS di Sidoarjo semenjak bulan Februari, argo tetap jalan," kata Hajid.

Selama ini, pihaknya masih mencatat sampah yang masuk, namun tidak ada penarikan biaya ke TPST. Karena perbup masih dibahas. "Bukan berarti kirim sampah ke TPA gratis. Tetap bertarif tapi penagihannya nanti ditotal setelah revisi," ucapnya.

Dirinya menampik anggapan bahwa mengirim sampah ke TPA tidak dikenakan biaya sama sekali selama proses revisi Perbup ini. Sehingga, TPST tidak asal membuang sampah. Mereka akan mengolah dulu. Sebab semakin sedikit sampah yang dibuang ke TPA, semakin sedikit pula biaya yang harus mereka keluarkan.

"Kalau mau biaya ringan, harusnya sampah diolah di TPS semaksimal mungkin, supaya tidak ada residu yang dibuang ke Jabon," pungkasnya.(loe)

DUTA